

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KAMPUNG SEREH DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA PAPUA

Hana Margaretha Uamang<sup>1</sup>

Marsi Adi Purwadi<sup>2</sup>  
marsipurwadi@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of village fund management and the level of community participation in development in Kampung Sereh, Sentani District, Jayapura Regency, Papua, as well as to identify inhibiting factors and strategies for improvement. The research method used a quantitative and qualitative approach involving 45 informants from village officials and community members from nine neighborhood units (RT). Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, with quantitative data analysis using frequency distribution and qualitative analysis using the Miles-Huberman model. The results showed that community participation was fairly good, with an average positive response rate of 74.5%, but the effectiveness of village fund management remained less effective because only 40% of projects aligned with planning documents and only 45% of the community perceived economic benefits. The main inhibiting factors include the community's passive mindset, low synergy between the Village Head and Ondoafi (customary leader), lack of understanding by Regional Device Work Units (SKPD) regarding participatory planning, and the impact of the COVID-19 pandemic which cut the development budget from Rp597 million to Rp403 million. The strategies developed include strengthening community capacity, stakeholder coordination, transparency in fund management, strengthening bottom-up strategies, economic empowerment, and resolving customary land disputes.*

*Keywords: Village Fund Effectiveness; Community Participation; Village Development*

### PENDAHULUAN

Pembangunan kampung pada hakikatnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengawas. Kartasmita (2001) menegaskan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan. Sementara itu, Suparno (2001) menyatakan bahwa pembangunan kampung dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat, di mana kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Dana Kampung yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip pengelolaan dana kampung menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mencakup transparansi, akuntabilitas, serta tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Partisipasi masyarakat sendiri didefinisikan oleh H.W. Arand sebagai keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai satu kesatuan, baik dalam bentuk partisipasi fisik seperti menyumbang tenaga, dana, dan barang, maupun partisipasi nonfisik seperti menyumbangkan ide, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Kogoya dkk. (2015) dalam studinya tentang pembangunan infrastruktur jalan kampung di Kabupaten Lanny Jaya menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dan peran pemerintah sebagai fasilitator. Sedangkan Rahman (2016) dalam penelitiannya tentang pemberdayaan partisipasi masyarakat menemukan bahwa keberhasilan pembangunan kampung sangat ditentukan oleh sinergi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian Halim (2020) yang meneliti kebijakan pembangunan dalam konsep kepemimpinan partisipatif dan menyimpulkan bahwa dokumen perencanaan sering kali tidak mencerminkan aspirasi riil masyarakat. Maripah (2017) juga menemukan adanya kesenjangan antara perencanaan partisipatif dalam RPJMDes dengan pelaksanaannya di lapangan. Berbagai studi ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana kampung merupakan faktor kunci, masih banyak ditemukan hambatan dalam implementasinya.

Fenomena empiris yang ditemukan di Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana dan realisasi pembangunan. Banyak program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai harapan, sebagian akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemotongan anggaran. Partisipasi masyarakat masih tergolong rendah karena masyarakat cenderung apatis dan tidak dilibatkan secara penuh dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Sosialisasi dan transparansi mengenai penggunaan dana kampung juga belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, terdapat dualisme kepemimpinan antara kepala kampung sebagai pemimpin formal dan *ondoafi* sebagai pemimpin adat informal yang belum sepenuhnya bersinergi dalam mendorong pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan dampak COVID-19 yang mengalihkan anggaran untuk penanganan kesehatan, sehingga program pembangunan fisik tertunda. Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa pembangunan kampung harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan hingga pemantauan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga hal utama, yaitu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Sereh, faktor-faktor apa saja yang menghambat pembangunan tersebut, serta strategi apa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kampung tersebut.

Penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan karena dua alasan utama. Pertama, adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas mengamanatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan kampung, realitas di Kampung Sereh menunjukkan bahwa masyarakat masih ditempatkan sebagai objek pembangunan. Keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sangat minim, sehingga program pembangunan yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kedua, keunikan konteks lokal Kampung Sereh yang memiliki dualisme kepemimpinan antara kepala kampung sebagai pemimpin formal dan *ondoafi* sebagai pemimpin adat informal. Sinergi antara kedua kekuasaan ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan, namun faktanya kolaborasi tersebut belum berjalan optimal. Selain itu, pandemi COVID-19 turut memperparah kondisi karena anggaran dialihkan untuk penanganan kesehatan, sehingga berbagai program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan menjadi tertunda. Kedua alasan ini menjadikan penelitian tentang efektivitas pengelolaan dana kampung dan partisipasi masyarakat di Kampung Sereh sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan lokasi di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, serta melibatkan data primer dari wawancara terhadap 45 informan yang terdiri dari perangkat kampung dan masyarakat dari sembilan RT, dan data sekunder dari dokumen resmi seperti APB Kampung tahun 2020 dan 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara tatap muka, dan dokumentasi, sementara kredibilitas data dijamin dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan deskriptif kuantitatif berupa distribusi frekuensi absolut dan relatif. Sedangkan untuk analisis data kualitatif menggunakan model Miles-Huberman yang dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, dengan fokus penelitian diukur melalui lima bentuk partisipasi masyarakat yakni partisipasi pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan dana.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, seperti yang disajikan pada Tabel 1 distribusi frekuensi, secara umum rata-rata 74,5 persen responden memberikan jawaban positif (Ya) terhadap berbagai indikator partisipasi dan manfaat pembangunan, sementara 25,5 persen menjawab negatif (Tidak). Angka ini mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tergolong cukup baik, namun masih menyisakan ruang perbaikan yang signifikan pada sejumlah indikator kritis, khususnya yang terkait dengan rendah efektifitas pengelolaan dana kampung.

**Tabel 1. Distribusi Frekuensi Efektifitas Pengelolaan Dana Kampung Dan Partisipasi Masyarakat**

No	Indikator Pernyataan	Ya (%)	Tidak (%)	Total (%)	Jumlah Responden (n)
1.	Keterlibatan dalam sosialisasi Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM)	72	28	100	45
2.	Adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam PBM	79	21	100	45
3.	Adanya kesepakatan dan keputusan bersama dalam PBM	70	30	100	45
4.	Program/Kegiatan pembangunan yang turun sesuai dengan dokumen PBM	40	60	100	45
5.	Keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi program	63	37	100	45
6.	Keterlibatan dalam penyusunan RPJM di tingkat RT/RW	95	5	100	45
7.	Pengetahuan tentang keberadaan dokumen RPJM Kampung	93	7	100	45
8.	Manfaat RPJM terhadap bidang pendidikan	98	2	100	45
9.	Manfaat RPJM terhadap bidang kesehatan	79	21	100	45
10.	Manfaat RPJM terhadap bidang ekonomi kerakyatan	45	55	100	45
11.	Manfaat RPJM terhadap bidang infrastruktur	85	15	100	45

Sumber : data diolah (2025)

Indikator paling kritis yang membuktikan rendahnya efektivitas pengelolaan dana kampung adalah temuan bahwa hanya 40 persen responden yang menyatakan Program/Kegiatan pembangunan yang turun sesuai dengan dokumen Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM), sementara 60 persen menyatakan tidak sesuai. Kesenjangan antara perencanaan dan realisasi ini menunjukkan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya mengacu pada hasil musyawarah partisipatif yang telah dilakukan bersama masyarakat, yang diperparah oleh pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah kampung mengalihkan anggaran dari bidang pembangunan ke penanggulangan bencana, sehingga anggaran pembangunan menurun drastis dari Rp597 juta di tahun 2020 menjadi hanya Rp403 juta di tahun 2021.

Di sisi lain, indikator-indikator partisipasi masyarakat menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Tabel distribusi frekuensi mengonfirmasi bahwa 72 persen masyarakat ikut serta dalam sosialisasi PBM, 79 persen mengakui adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, 70 persen menyatakan adanya kesepakatan bersama dalam perencanaan, dan 63 persen terlibat dalam monitoring dan evaluasi program. Angka-angka ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam

tahap perencanaan dan pengawasan berada pada kategori cukup baik hingga baik, meskipun masih terdapat sekitar 30 persen masyarakat yang belum dilibatkan secara optimal. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan strategi bottom-up melalui penyusunan RPJM di tingkat RT dan RW, tabel distribusi frekuensi menunjukkan angka partisipasi yang sangat tinggi, yaitu 95 persen responden terlibat dalam penyusunan RPJM dan 93 persen mengetahui keberadaan dokumen RPJM Kampung, yang merupakan dua indikator tertinggi dalam seluruh distribusi. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme perencanaan dari bawah telah berjalan dengan sangat baik di Kampung Sereh, namun sayangnya keberhasilan di tahap perencanaan ini tidak diikuti dengan keberhasilan di tahap realisasi dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Tabel 1 juga mengonfirmasi bahwa manfaat RPJM tertinggi dirasakan di bidang pendidikan, yaitu 98 persen responden merasakan manfaat, diikuti bidang infrastruktur sebesar 85 persen, dan bidang kesehatan sebesar 79 persen. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah hanya 45 persen masyarakat yang merasakan manfaat RPJM di bidang ekonomi kerakyatan, yang berarti lebih dari setengah responden (55 persen) menyatakan tidak merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi dari program pembangunan kampung. Rendahnya persentase manfaat di bidang ekonomi ini menjadi indikator terendah ketiga dalam tabel dan menjelaskan mengapa efektivitas pengelolaan dana kampung dinilai kurang efektif, karena pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari infrastruktur fisik semata tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat. Hambatan-hambatan yang diidentifikasi dalam hasil analisis, seperti sulitnya mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini menganggap pemerintah sebagai pelaku utama pembangunan, kurangnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap perencanaan partisipatif, serta tidak adanya kesepakatan terkait sengketa tanah adat, secara tidak langsung tercermin dari rendahnya angka kesesuaian Program/Kegiatan (40 persen) dan rendahnya persentase manfaat ekonomi (45 persen). Dengan demikian, tabel distribusi frekuensi berhasil memvalidasi dan mengkuantifikasi kesimpulan utama penelitian bahwa meskipun partisipasi masyarakat dalam perencanaan tergolong cukup baik dengan rata-rata 74,5 persen, efektivitas pengelolaan dana kampung tetap tergolong kurang efektif karena realisasi Program/Kegiatan sering tidak sesuai rencana dan manfaat ekonomi belum dirasakan oleh mayoritas masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan penelitian serta analisis deskriptif kualitatif dengan model Miles-Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan), teridentifikasi tiga faktor utama yang menjadi penghambat pembangunan di Kampung Sereh. **Pertama**, faktor internal masyarakat yang paling dominan adalah sulitnya mengubah pola pikir masyarakat dari paradigma lama yang selama ini menganggap bahwa pemerintah adalah pelaku utama pembangunan, sementara masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat pasif. Pola pikir ini menyebabkan masyarakat cenderung apatis dan kurang memiliki inisiatif untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk sumbangan tenaga, pemikiran, maupun dana. Masyarakat masih terbiasa menunggu program dari pemerintah daripada secara proaktif mengusulkan kebutuhan mereka. Hal ini diperparah oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah dan keterbatasan akses terhadap informasi mengenai mekanisme partisipasi dalam pengelolaan dana kampung. Selain itu, masih adanya sengketa tanah adat antara beberapa kelompok masyarakat juga menjadi penghambat, karena beberapa program pembangunan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan atau terhambat akibat tidak adanya kesepakatan bersama mengenai status dan kepemilikan tanah.

**Kedua**, faktor kelembagaan dan koordinasi terlihat dari kurangnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap konsep perencanaan pembangunan partisipatif yang telah disusun oleh pemerintah kampung bersama masyarakat. SKPD yang bertugas menurunkan program ke tingkat kampung sering kali tidak mengacu pada dokumen Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM) atau RPJM Kampung, melainkan lebih berpedoman pada program kerja masing-masing instansi yang bersifat top-down. Akibatnya, Program/Kegiatan-Program/Kegiatan yang turun ke kampung sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat yang telah diaspirasikan dalam musyawarah perencanaan. Hal ini tercermin dari temuan bahwa hanya 40 persen responden yang menyatakan Program/Kegiatan yang turun sesuai dengan dokumen perencanaan. Selain itu, dualisme kepemimpinan antara Kepala Kampung sebagai pemimpin formal dan Ondoafi sebagai pemimpin adat informal juga menjadi kendala. Sinergi antara kedua kekuatan ini belum berjalan optimal, sehingga dalam beberapa pengambilan keputusan strategis terkait pembangunan, terjadi tarik-menarik kepentingan yang menyebabkan kebijakan menjadi tidak tegas dan pelaksanaan program menjadi lambat.

**Ketiga**, faktor struktural dan kebijakan yang paling berpengaruh adalah pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak akhir tahun 2019. Pandemi ini menyebabkan pemerintah pusat dan daerah melakukan pemotongan dan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, yang berdampak langsung pada menurunnya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur kampung. Sebagaimana ditunjukkan dalam hasil analisis, anggaran untuk bidang pembangunan kampung menurun drastis dari Rp597 juta di tahun 2020 menjadi Rp403 juta di tahun 2021. Penurunan anggaran ini memaksa pemerintah kampung untuk menunda atau membatalkan beberapa Program/Kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, sehingga program-program yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat menjadi tidak terealisasi tepat waktu. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga membatasi interaksi dan pertemuan tatap muka, sehingga proses musyawarah perencanaan partisipatif yang seharusnya melibatkan banyak orang menjadi terhambat.

## 2. Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana kampung di Kampung Sereh tergolong kurang efektif. Argumentasi ini didasarkan pada temuan bahwa hanya 40 persen responden yang menyatakan Program/Kegiatan pembangunan yang turun sesuai dengan dokumen Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM), sementara 60 persen menyatakan tidak sesuai. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, dana kampung harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Ketidaksiuaian antara rencana dan realisasi ini menunjukkan bahwa prinsip efektivitas belum sepenuhnya terpenuhi.

Lebih lanjut, secara normatif telah dikemukakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan kampung harus melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Temuan di Kampung Sereh menunjukkan bahwa meskipun tahap perencanaan partisipatif telah berjalan dengan baik, tahap pelaksanaan justru menjadi titik lemah karena banyak Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah kampung mengalihkan sebagian besar anggaran pembangunan ke bidang penanggulangan bencana, sehingga anggaran pembangunan fisik menurun dari Rp597 juta di tahun 2020 menjadi Rp403 juta di tahun 2021. Kedua, kurangnya pemahaman dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap perencanaan partisipatif, sehingga program yang diturunkan sering kali tidak mengakomodir aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam dokumen PBM. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maripah (2017) di Kampung Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang menemukan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan RPJMDes sering kali tidak diikuti dengan pelaksanaan yang sesuai karena adanya intervensi dari pihak luar dan keterbatasan anggaran. Demikian pula, penelitian oleh Haliim (2020) menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dalam konsep kepemimpinan partisipatif masih menghadapi tantangan serius di tingkat implementasi, terutama karena rendahnya kapasitas aparatur kampung dalam mengelola dana kampung secara akuntabel.

Dalam konteks partisipasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung Sereh tergolong cukup baik. Terlihat rata-rata jawaban positif sebesar 74,5 persen untuk berbagai indikator partisipasi. Secara spesifik, 72 persen masyarakat ikut serta dalam sosialisasi PBM, 79 persen mengakui adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, 70 persen menyatakan adanya kesepakatan bersama, dan 63 persen terlibat dalam monitoring dan evaluasi program. Angka-angka ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Namun demikian, jika merujuk pada konsep partisipasi yang dikemukakan oleh H.W. Arand, partisipasi masyarakat tidak cukup hanya diukur dari kehadiran fisik atau keterlibatan dalam sosialisasi, tetapi harus mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta evaluasi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun 95 persen masyarakat terlibat dalam penyusunan RPJM di tingkat RT dan RW, hanya 45 persen yang merasakan manfaat di bidang ekonomi kerakyatan. Ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif, di mana aspirasi masyarakat belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.

Lebih lanjut, bentuk partisipasi masyarakat yang terjadi di Kampung Sereh didominasi oleh partisipasi dalam bentuk nonfisik seperti menyumbangkan ide dan terlibat dalam pengambilan keputusan, sementara partisipasi dalam bentuk fisik seperti menyumbang tenaga, dana, dan barang relatif rendah karena masyarakat masih menganggap bahwa pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini sejalan dengan hambatan pertama yang diidentifikasi dalam penelitian, yaitu sulitnya mengubah pola pikir masyarakat dari yang selama ini menganggap pemerintah sebagai pelaku utama pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya sengketa tanah adat yang menyebabkan beberapa program pembangunan tidak mendapatkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2016) yang menyatakan bahwa pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dan pola pikir masyarakat setempat. Di wilayah Papua yang masih kental dengan nilai-nilai adat, pendekatan pembangunan tidak bisa bersifat top-down tetapi harus menghormati kearifan lokal dan melibatkan tokoh adat (Ondoafi) secara aktif. Penelitian oleh Kogoya dkk. (2015) di Kabupaten Lanny Jaya juga menemukan hal serupa, bahwa pembangunan infrastruktur jalan kampung di Papua memerlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh komponen kampung, termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.

Salah satu temuan paling positif dalam penelitian ini adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM di tingkat RT dan RW, yaitu 95 persen, serta tingginya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dokumen RPJM Kampung, yaitu 93 persen. Ini menunjukkan bahwa strategi bottom-up yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik di Kampung Sereh. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka dari tingkat paling bawah, yang kemudian dikompilasi menjadi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kampung.

Namun demikian, keberhasilan di tahap perencanaan ini belum diikuti oleh keberhasilan di tahap realisasi dan pemanfaatan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hanya 40 persen Program/Kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan, dan hanya 45 persen masyarakat yang merasakan manfaat ekonomi dari pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi bottom-up masih menghadapi tantangan serius di tahap implementasi. Menurut Suadi dan Rostianingsih (2012), perencanaan pembangunan partisipatif akan berhasil jika didukung oleh komitmen semua pihak, termasuk pemerintah kampung, SKPD, dan masyarakat, serta didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan mekanisme pengawasan yang efektif. Di Kampung Sereh, komitmen tersebut belum sepenuhnya terbangun, terutama karena kurangnya pemahaman SKPD terhadap perencanaan partisipatif dan adanya pandemi COVID-19 yang mengganggu stabilitas anggaran.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa manfaat RPJM paling tinggi dirasakan di bidang pendidikan (98 persen) dan infrastruktur (85 persen), sementara di bidang ekonomi kerakyatan hanya 45 persen masyarakat yang merasakan manfaat. Perbedaan yang cukup tajam ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kampung. Tingginya manfaat di bidang pendidikan dan infrastruktur menunjukkan bahwa program-program seperti pembangunan posyandu, rehab rumah kampung, lampu jalan, dan saluran drainase telah berhasil dilaksanakan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, rendahnya manfaat di bidang ekonomi mengindikasikan bahwa program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengembangan usaha produktif belum berjalan optimal atau belum menyentuh sebagian besar masyarakat.

Menurut teori pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro (2000), pembangunan bukan hanya fenomena fisik semata, tetapi pada akhirnya harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia secara holistik, termasuk di dalamnya aspek ekonomi dan kesejahteraan. Temuan di Kampung Sereh menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan pendidikan telah berhasil, namun pembangunan ekonomi masih tertinggal. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kampung untuk merancang program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa efektivitas pengelolaan dana kampung tidak hanya ditentukan oleh terserapnya anggaran atau terealisasinya Program/Kegiatan secara administratif, tetapi juga oleh kesesuaian antara rencana dan realisasi serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus bersifat

substansif, tidak hanya prosedural, dan harus mencakup seluruh tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga evaluasi.

Adapun secara praktis, berdasarkan faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi di atas, terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung Sereh. **Pertama** adalah penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan partisipatif. Pemerintah kampung perlu secara rutin mengadakan sosialisasi dan pelatihan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang mekanisme pengelolaan dana kampung, hak dan kewajiban masyarakat dalam pembangunan, serta keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan fisik seperti gotong royong membangun jalan, drainase, atau fasilitas umum. Dengan peningkatan kapasitas ini, masyarakat tidak hanya memahami pentingnya partisipasi tetapi juga memiliki keterampilan yang memadai untuk berkontribusi secara nyata. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha kecil, dan akses permodalan perlu digencarkan mengingat hanya 45 persen masyarakat yang merasakan manfaat ekonomi dari pembangunan selama ini.

**Kedua** adalah penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Pemerintah kampung perlu membangun forum komunikasi rutin yang melibatkan Kepala Kampung, Ondoafi (pemimpin adat), SKPD terkait, Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat dari setiap RT dan RW. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk menyamakan persepsi, mengoordinasikan program, menyelesaikan sengketa adat, serta memastikan bahwa program yang diturunkan oleh SKPD benar-benar sesuai dengan dokumen perencanaan partisipatif. Untuk mengatasi masalah dualisme kepemimpinan, perlu disepakati mekanisme pembagian peran yang jelas antara Kepala Kampung dan Ondoafi. Kepala Kampung lebih berfokus pada aspek administratif dan teknis pembangunan, sementara Ondoafi berperan dalam memberikan legitimasi adat, memediasi sengketa tanah, dan menggerakkan partisipasi masyarakat melalui jalur adat yang lebih dipatuhi oleh warga asli Kampung Sereh.

**Ketiga** adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Pemerintah kampung perlu mengumumkan secara terbuka dan berkala kepada seluruh masyarakat mengenai rencana anggaran, realisasi belanja, kemajuan Program/Kegiatan, serta kendala yang dihadapi. Pengumuman ini dapat dilakukan melalui papan informasi publik di setiap RT, melalui grup WhatsApp warga, atau melalui pertemuan-pertemuan rutin tingkat kampung. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat memantau langsung apakah dana kampung digunakan sesuai peruntukannya dan apakah Program/Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam tim monitoring dan evaluasi independen yang bertugas mengawasi jalannya pembangunan, sehingga jika terjadi ketidaksesuaian dapat segera diketahui dan diperbaiki. Temuan bahwa 37 persen masyarakat tidak dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk meningkatkan partisipasi di tahap ini.

**Keempat** adalah penguatan strategi bottom-up dengan memastikan bahwa setiap usulan masyarakat yang tertuang dalam RPJM di tingkat RT dan RW benar-benar diakomodir dalam APB Kampung dan ditindaklanjuti oleh SKPD. Pemerintah kampung perlu melakukan advokasi kepada SKPD terkait agar program yang diturunkan mengacu pada dokumen perencanaan kampung, bukan hanya pada program kerja instansi masing-masing. Jika diperlukan, pemerintah kampung dapat mengusulkan mekanisme insentif dan sanksi bagi SKPD yang konsisten atau tidak konsisten dengan perencanaan partisipatif. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap Program/Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar melibatkan tenaga kerja lokal dan menggunakan bahan baku lokal, sesuai dengan amanat Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pelaksanaan dana kampung diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga akan menggerakkan perekonomian lokal.

**Kelima** adalah pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mengingat hanya 45 persen masyarakat yang merasakan manfaat ekonomi dari pembangunan, pemerintah kampung perlu melakukan pemetaan potensi ekonomi lokal yang dimiliki Kampung Sereh, seperti pertanian kebun tradisional, dusun sagu, perikanan, dan usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan pemetaan tersebut, pemerintah kampung dapat merancang program pelatihan keterampilan, bantuan alat produksi, akses permodalan melalui koperasi kampung, serta pendampingan

pemasaran hasil produksi. Program ini harus dirancang secara partisipatif bersama masyarakat sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Selain itu, pemerintah kampung juga dapat memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok usaha bersama yang melibatkan perempuan, pemuda, dan masyarakat kurang mampu, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

**Keenam** adalah penyelesaian sengketa tanah adat secara musyawarah dengan melibatkan semua pihak yang berkonflik serta tokoh adat dan tokoh masyarakat yang dihormati. Tanah adat yang menjadi sengketa sering kali menjadi penghambat utama pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah kampung perlu memfasilitasi dialog dan mediasi secara berkelanjutan hingga ditemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Solusi tersebut dapat berupa kompensasi, pembagian hasil, atau relokasi Program/Kegiatan ke lokasi lain yang tidak disengketakan. Dalam proses ini, peran Ondoafi sebagai pemimpin adat sangat strategis karena memiliki otoritas moral untuk memberikan keputusan adat yang mengikat. Dengan terselesaikannya sengketa tanah, Program/Kegiatan-Program/Kegiatan pembangunan yang selama ini tertunda dapat segera dilaksanakan.

Dengan menerapkan keenam strategi tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung Sereh dapat meningkat secara signifikan, tidak hanya dalam bentuk kehadiran pada sosialisasi tetapi juga dalam bentuk kontribusi nyata seperti tenaga, pemikiran, keahlian, barang, dan dana. Pada gilirannya, peningkatan partisipasi ini akan mendorong efektivitas pengelolaan dana kampung menjadi lebih baik, karena masyarakat tidak hanya menjadi perencana tetapi juga pelaksana, pengawas, dan penikmat hasil pembangunan. Dengan demikian, tujuan pembangunan kampung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dapat tercapai secara lebih optimal.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Sereh, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan tergolong cukup baik dengan rata-rata jawaban positif responden sebesar 74,50 persen, namun partisipasi ini masih bersifat prosedural karena hanya 40 persen program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan dan hanya 45 persen masyarakat yang merasakan manfaat di bidang ekonomi. Rendahnya kesesuaian program/kegiatan dan manfaat ekonomi ini disebabkan oleh tiga faktor penghambat, yaitu sulitnya mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap pemerintah sebagai pelaku utama pembangunan serta adanya sengketa tanah adat, kurangnya pemahaman SKPD terhadap perencanaan partisipatif dan belum optimalnya sinergi antara Kepala Kampung dengan Ondoafi, serta pandemi COVID-19 yang memotong anggaran pembangunan dari Rp597 juta menjadi Rp403 juta. Untuk mengatasi hambatan tersebut, enam strategi dapat dikembangkan secara terintegrasi, meliputi penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan partisipatif dan pemberdayaan ekonomi, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan melalui forum rutin dan pembagian peran yang jelas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung dengan melibatkan masyarakat dalam monitoring, penguatan strategi bottom-up dengan mengakomodir usulan masyarakat dalam APB Kampung dan melibatkan tenaga lokal, pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran, serta penyelesaian sengketa tanah adat secara musyawarah dengan peran aktif Ondoafi. Dengan penerapan strategi tersebut secara berkelanjutan, diharapkan partisipasi masyarakat meningkat dan efektivitas pengelolaan dana kampung menjadi lebih baik.

### 2. Saran-Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pengelolaan dana kampung dan partisipasi masyarakat, untuk itu bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan indikator pengukuran efektivitas yang lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan realisasi anggaran tetapi juga kesesuaian rencana dengan realisasi serta dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial budaya yang berbeda untuk menghasilkan generalisasi teori yang lebih luas.

Kemudian secara praktis disarankan Pemerintah Kampung Sereh untuk mengadakan sosialisasi rutin di setiap RT, mengajukan anggaran yang lebih memadai untuk perencanaan dan pemberdayaan ekonomi, serta melibatkan masyarakat dalam seluruh tahap pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Transparansi pengelolaan dana kampung perlu ditingkatkan melalui papan informasi publik dan grup WhatsApp warga. Pemerintah kampung bersama SKPD dan Onoafi harus segera menyelesaikan sengketa tanah adat melalui mediasi, serta memperkuat koordinasi dengan SKPD agar program yang diturunkan sesuai dengan dokumen PBM dan RPJM Kampung. Terakhir, masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi, tidak hanya hadir dalam sosialisasi tetapi juga menyumbangkan ide, tenaga, keahlian, serta ikut mengawasi jalannya pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Profil Kampung Sereh. (2018). Profil Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Pemerintah Kampung Sereh.
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987, 1–14.
- Haliim, W. (2020). Kebijakan pembangunan dalam konsep kepemimpinan partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91–104. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>
- Hayati, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kampung Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Negara*, 5, 5375–5388.
- Kartasmita, G. (2001). Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Penerbit Buku Kompas.
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, E. (2015). Pembangunan infrastruktur jalan kampung di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 1–14.
- Kurniyati, Y. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Maripah. (2017). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Kampung Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Kementerian Dalam Negeri RI.
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung. *WEDANA: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(1), 189–199.
- Siagian, S. P. (1994). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Gunung Agung.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi kampung: Panduan tata kelola keuangan kampung*. Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (1995). *Pengantar teori pembangunan ekonomi*. LPFE UI.
- Suwandi, & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan pembangunan partisipatif di Kampung Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2), 261–270.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara.